

POLICY BRIEF

Krisis Legitimasi Demokrasi Lokal: Urgensi Kurikulum Pendidikan Politik Berbasis Nilai Lokal untuk Memulihkan Partisipasi Pilkada Jawa Barat

Ditujukan Kepada: Gubernur Provinsi Jawa Barat

Disusun oleh:

Mochamad Ajie Raharjo, S.IP. – Analis Kebijakan Ahli Pertama

Instansi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Ringkasan Eksekutif

Jawa Barat menghadapi krisis partisipasi politik yang nyata: tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada 2024 anjlok menjadi 68,06%, turun signifikan dari 74% pada periode sebelumnya. Dengan 35,9 juta pemilih terdaftar, lebih dari 11 juta warga Jawa Barat tidak menggunakan hak pilihnya, sebuah alarm bagi legitimasi demokrasi lokal. Jika tidak segera ditangani, penurunan ini berisiko melembaga dan melemahkan legitimasi pemerintahan daerah secara struktural.

Analisis USG terhadap lima faktor penyebab mengidentifikasi akar masalah utama pada lemahnya sosialisasi dan edukasi politik (skor 14), yang bersifat formalistik, dilakukan mendekati Pilkada saja, dan tidak berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa lebih dari 50% pemilih adalah Generasi Z dan Milenial yang justru paling rendah tingkat partisipasinya. Absennya pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan menjadi kegagalan kebijakan yang harus segera direspons oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Dari tiga alternatif kebijakan yang dievaluasi melalui analisis biaya-manfaat dan Grid Analysis Model, kebijakan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Politik Berbasis Nilai Lokal memperoleh skor tertinggi (8,5/10), unggul dalam efektivitas (9) dan responsivitas (9). Kebijakan ini direkomendasikan untuk segera diwujudkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai turunan Permendagri No. 36 Tahun 2010, dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab utama. Implementasi kurikulum ini bersifat lintas generasi, terukur, dan berpotensi mencetak agen-agen perubahan demokrasi secara berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Pilkada Jawa Barat 2024 mencatat penurunan partisipasi pemilih yang mengkhawatirkan: dari 74% menjadi 68,06%, artinya lebih dari 11 juta dari 35,9 juta pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. Tren ini merupakan sinyal kegagalan kebijakan yang membutuhkan respons segera, bukan sekadar evaluasi pasca-Pilkada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik mengamanatkan pemerintah daerah—dalam hal ini Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat—untuk mengambil peran aktif dalam membangun literasi dan partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

Policy brief ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah penurunan partisipasi tersebut, mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia, dan merekomendasikan langkah konkret yang dapat segera diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan dan meningkatkan partisipasi politik menjelang Pemilu berikutnya.

No.	Kabupaten/Kota	% Pengguna Hak Pilih dari DPT
1	Kabupaten Bandung	72,21%
2	Kabupaten Bandung Barat	71,86%
3	Kabupaten Bekasi	66,18%
4	Kabupaten Bogor	58,52%
5	Kabupaten Ciamis	70,90%
6	Kabupaten Cianjur	61,52%
7	Kabupaten Cirebon	59,38%
8	Kabupaten Garut	70,60%
9	Kabupaten Indramayu	65,04%
10	Kabupaten Karawang	69,25%
11	Kabupaten Kuningan	65,49%
12	Kabupaten Majalengka	76,26%
13	Kabupaten Pangandaran	78,00%
14	Kabupaten Purwakarta	73,75%
15	Kabupaten Subang	70,14%
16	Kabupaten Sukabumi	56,51%
17	Kabupaten Sumedang	74,04%
18	Kabupaten Tasikmalaya	67,90%
19	Kota Bandung	64,64%
20	Kota Banjar	71,48%
21	Kota Bekasi	55,44%
22	Kota Bogor	63,94%
23	Kota Cimahi	71,71%
24	Kota Cirebon	66,26%
25	Kota Depok	61,29%
26	Kota Sukabumi	69,61%
27	Kota Tasikmalaya	76,63%

II. Deskripsi Masalah

Akar masalah penurunan partisipasi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil akumulasi dari kegagalan kebijakan yang saling terhubung. Secara struktural, terdapat lima klaster masalah yang dapat diidentifikasi, namun hanya satu yang masuk dalam domain kewenangan kebijakan Bakesbangpol dan bersifat paling mendesak untuk ditangani karena memiliki efek rambatan (*multiplier effect*) terhadap faktor-faktor lainnya:

1. Faktor pemilih;
Faktor pemilih menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi, di mana masih banyak masyarakat yang apatis dan tidak percaya bahwa pemilu dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi politik, di mana banyak warga belum memahami bahwa suara mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan publik di daerahnya
2. Faktor sistem penyelenggaraan pemilu;
Dari sisi sistem penyelenggaraan, masih sering ditemukan kendala teknis seperti sulitnya akses ke TPS, serta akurasi data pemilih yang belum maksimal dan

masalah administratif seperti belum memiliki e-KTP, yang menghambat warga menggunakan hak pilihnya secara optimal.

3. Faktor aktor politik;
Masalah juga muncul dari aktor politik, di mana kualitas calon kepala daerah sering tidak mencerminkan aspirasi riil masyarakat dan kurang memberi keteladanan, yang justru memperkuat ketidakpercayaan publik. Selain itu, pola kampanye yang negatif, transaksional, dan tidak mendidik membuat masyarakat semakin jenuh dan kehilangan kepercayaan terhadap proses politik
4. Faktor sosialisasi dan edukasi;
Faktor sosialisasi dan edukasi merupakan akar masalah kebijakan yang paling kritis (skor USG: 14). Kegagalan di klaster ini bersifat struktural, bukan sekadar kekurangan sosialisasi, melainkan absennya pendidikan politik yang sistematis, berkelanjutan, dan relevan secara kultural. Tiga kegagalan kebijakan yang dapat diidentifikasi: (1) sosialisasi dilakukan secara episodik menjelang Pilkada, bukan sebagai program berkelanjutan; (2) konten edukasi bersifat normatif dan tidak relevan dengan pengalaman sehari-hari generasi muda; dan (3) tidak ada kurikulum pendidikan politik yang terintegrasi dalam satuan pendidikan. Akibatnya, lebih dari 50% pemilih yang terdiri dari Generasi Z dan Milenial tidak memiliki fondasi literasi politik yang cukup untuk terlibat dalam proses demokrasi secara aktif dan sadar. Kegagalan di klaster ini secara langsung memperparah apatis pemilih, melemahkan kepercayaan publik terhadap aktor politik, dan mereproduksi kondisi sosial-ekonomi yang tidak kondusif bagi partisipasi politik
5. Faktor sosial-ekonomi.
Faktor sosial-ekonomi ikut memengaruhi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, di mana pemilu bukan menjadi prioritas karena kebutuhan ekonomi lebih mendesak. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga atau teman yang tidak memilih juga dapat menularkan sikap apatis secara kolektif.

III. Analisis Masalah

Dari beberapa faktor masalah yang teridentifikasi, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai urutan prioritas masalah yang perlu diselesaikan dengan menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), dengan

skoring terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Skoring USG Permasalahan Menurunnya Partisipasi Politik di Jabar

No	Identifikasi Masalah	Skor			Total Skor
		U	S	G	
1	Pemilih	5	4	4	13
2	Sistem penyelenggaraan pemilu	4	4	4	12
3	Aktor politik	4	5	4	13
4	Sosialisasi dan edukasi	4	5	5	14
5	Sosial-ekonomi	4	5	4	13

Keterangan skoring:

Skor	Keterangan
1	Sangat Penting
2	Penting
3	Netral
4	Tidak Penting
5	Sangat Tidak Penting

Berkaitan dengan hal dimaksud di atas, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Faktor yang termasuk ke dalam kategori kebijakan publik yaitu faktor sistem penyelenggaraan pemilu dan faktor sosialisasi dan edukasi;
2. Faktor yang termasuk ke dalam kategori privat yaitu faktor pemilih;
3. Faktor yang termasuk ke dalam kategori faktor yang dapat menjadi faktor kebijakan publik dan kebijakan privat yaitu faktor aktor politik dan faktor sosial-ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, faktor permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah faktor yang termasuk ke dalam kategori kebijakan publik, yaitu faktor sosialisasi dan edukasi. Dimana faktor ini merupakan **faktor yang paling strategis** untuk ditangani dalam waktu dekat, karena berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki faktor lainnya secara tidak langsung. Misalnya, dengan edukasi politik yang baik, dengan melakukan kajian mendalam terhadap bentuk, metode, dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan edukasi politik di tingkat daerah, serta merumuskan kebijakan atau rekomendasi yang dapat memperkuat peran pemerintah daerah, khususnya

Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

IV. Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Guna mengatasi kegagalan kebijakan sosialisasi dan edukasi politik, terdapat tiga opsi kebijakan yang secara komparatif dievaluasi berdasarkan kelayakan implementasi, cakupan sasaran, dan potensi dampak jangka panjang. Sasaran utama kebijakan difokuskan pada Generasi Z dan Milenial yang secara kolektif merepresentasikan lebih dari 50% pemilih di Jawa Barat (dari total DPT 35.925.960 jiwa pada Pilkada 2024), namun memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah. Perbandingan ketiga opsi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPT Jawa Barat pada Pilkada Tahun 2024: 35.925.960 Jiwa.
2. Secara nasional, Generasi Z merupakan kelompok pemilih terbesar di Jawa Barat, mencakup sekitar 22% dari total pemilih.
3. Jika digabungkan dengan Generasi Millenial, kedua kelompok ini mewakili lebih dari 50% pemilih di provinsi tersebut

Selain dari data pemilih yang ada, perlu juga dipertimbangkan pertumbuhan pemilih di masa mendatang. Maka, alternatif-alternatif rekomendasi yang disusun akan diarahkan kepada sasaran dari generasi Z dan Milenial yang secara keseluruhan mewakili lebih dari 50% pemilih di provinsi tersebut.

Ketiga opsi berikut dievaluasi secara komparatif berdasarkan potensi dampak, biaya, dan kesesuaian dengan kapasitas kelembagaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat:

1. Membangun Kolaborasi dengan Komunitas Pemuda

Kolaborasi merupakan upaya membangun ruang dialog, kerja sama, dan co-creation antara pemerintah dan komunitas. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program pendidikan politik dan kepemiluan, maka pemahaman dan partisipasi politik dapat dibangun dari dalam komunitas itu sendiri. Implementasi dari model kolaboratif ini tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta perencanaan yang matang, dan pelaksanaan kegiatan secara berulang di wilayah dengan karakteristik sosial-politik tertentu agar hasil yang dicapai dapat lebih merata dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Engagement melalui Media Sosial dan Aktivitas Kreatif

Peningkatan engagement atau keterlibatan aktif pemilih, khususnya generasi muda, menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi politik yang inklusif dan berkesinambungan. Dengan memanfaatkan media sosial yang dewasa ini memegang peranan strategis sebagai ruang interaksi publik yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik dan kepemiluan secara dinamis dan dua arah melalui pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) untuk menghadirkan konten-konten edukatif yang dikemas secara kreatif, mulai dari video pendek, podcast, infografis hingga kampanye digital yang bersifat interaktif.

Strategi ini merupakan pengembangan dari pendekatan sosialisasi informal yang lebih komunikatif dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik Generasi Z dan Milenial yang lebih responsif terhadap pendekatan visual, naratif, dan kolaboratif. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi strategi ini mencakup beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Relevansi pesan;
- 2) Dukungan anggaran;
- 3) Kolaborasi lintas sektor; dan
- 4) Pemanfaatan momentum strategis (seperti hari besar nasional).

3. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Politik Berbasis Nilai Budaya

Edukasi kepada pemilih dan calon pemilih dalam konteks ini diarahkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan politik berbasis nilai budaya sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Dasar tentang Sistem Politik dan Demokrasi;
- 2) Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis;
- 3) Keterampilan Partisipasi Politik;
- 4) Relevansi dengan Isu Sosial dan Politik Kontemporer; dan
- 5) Pendidikan Politik dalam Konteks Digital.

Substansi kurikulum harus mencakup materi-materi seperti:

- 1) Dasar-dasar demokrasi dan sistem politik Indonesia;

- 2) Hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu;
- 3) Peran generasi muda dalam kehidupan politik;
- 4) Pencegahan politik uang, intoleransi, dan disinformasi;
- 5) Penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Penyusunan kurikulum ini juga mempertimbangkan karakteristik generasi pemilih, perkembangan teknologi informasi, serta metode pembelajaran partisipatif dan kreatif. Oleh karena itu, edukasi politik melalui kurikulum tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga mendorong pembentukan sikap kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

V. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat maka dilakukan beberapa analisis sebagai berikut, yaitu:

1. Analisa Biaya Manfaat (Cost Benefit Analysis) terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan:

No	Alternatif Kebijakan	Biaya	Manfaat
1	Membangun Kolaborasi dengan Komunitas Pemuda (Gen Z, komunitas kreatif, dll.)	1) Membutuhkan waktu untuk membangun jaringan dan kepercayaan dengan komunitas; 2) Perlu alokasi anggaran untuk fasilitasi kegiatan bersama komunitas (lokasi, logistik, narasumber); 3) Variasi pendekatan dibutuhkan sesuai karakter komunitas (non-uniform); 4) Tidak semua komunitas memiliki kapasitas pengelolaan kegiatan yang baik;	1) Efektif menjangkau segmen anak muda secara langsung dan relevan; 2) Dapat menciptakan efek bola salju (komunitas menyebarkan pesan politik secara organik); 3) Menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi; 4) Potensi keberlanjutan tinggi karena sifatnya partisipatif dan berbasis jejaring sosial alami.
2	Peningkatan Engagement melalui Media Sosial dan Kegiatan Kreatif	1) Membutuhkan anggaran yang mencukupi untuk produksi; 2) Perlu tim dengan keahlian desain, konten,	1) Menjangkau audiens luas dan lintas wilayah dengan biaya relatif efisien per orang;

		3) dan manajemen medsos; 4) Konten harus strategis; Dampaknya bisa bersifat jangka pendek jika tidak dikemas berkelanjutan;	2) Daya tarik visual dan interaktif meningkatkan atensi dan partisipasi; 3) Fleksibel dan dapat menyesuaikan isu terkini dengan cepat; 4) Potensi viral dan diskusi publik tinggi;
3	Kelas Pendidikan Politik Berbasis Kurikulum dan Nilai Lokal	1) Membutuhkan waktu untuk menyusun kurikulum yang kontekstual dan aplikatif; 2) Diperlukan narasumber atau fasilitator yang kompeten dan memahami nilai lokal; 3) Biaya pelatihan, modul, dan monitoring cukup signifikan di awal; 4) Tidak dapat dilakukan secara massal dalam waktu singkat;	1) Memberikan pemahaman politik yang mendalam, sistematis, dan berakar pada konteks budaya lokal; 2) Dampak jangka menengah dan panjang karena membentuk pola pikir dan karakter politik; 3) Mendorong kaderisasi agen perubahan politik yang sadar nilai; 4) Dapat dijadikan model pembelajaran lintas generasi dan lintas wilayah dengan hasil yang terukur;

2. **Grid Analisis Model** dengan pembobotan terhadap kriteria-kriteria **alternatif-alternatif kebijakan** yang diusulkan:

No	Alternatif Kebijakan	Kriteria (Skor 1-10)			Total Skor
		Efektifitas (35%)	Efisiensi (25%)	Responsif (40%)	
1	Membangun Kolaborasi dengan Komunitas Pemuda (Gen Z, komunitas kreatif, dll.)	7 (2,45)	8 (2)	9 (3,6)	8,05
2	Peningkatan Engagement melalui Media Sosial dan Kegiatan Kreatif	8 (2,8)	8 (2)	7 (2,8)	7,6

3	Kelas Pendidikan Politik Berbasis Kurikulum dan Nilai Lokal	9 (3,15)	7 (1,75)	9 (3,6)	8,5
---	---	-------------	-------------	------------	-----

Berdasarkan hasil analisa biaya manfaat serta pembobotan kriteria dengan menggunakan Grid Analisis Model diatas, dapat disimpulkan bahwa **Kelas Pendidikan Politik Berbasis Kurikulum dan Nilai Lokal** atau **penyusunan Kurikulum Pendidikan Politik** merupakan pilihan yang tepat untuk rekomendasi kebijakan karena merupakan kegiatan yang memiliki dampak untuk jangka menengah dan jangka panjang, dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, dapat melahirkan agen-agen informasi secara tidak langsung di lingkungannya dan antar generasi, serta memiliki nilai pembobotan yang cukup signifikan berdasarkan hasil pembobotan terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, dan responsif.

VI. Strategi Implementasi

Strategi Implementasi Kebijakan: Kelas Pendidikan Politik Berbasis Kurikulum dan Nilai Lokal

1. Penanggung Jawab dan Mitra Kunci, yang terdiri dari:

- 1) Penanggung Jawab Utama:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat – sebagai koordinator substansi pendidikan politik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat – sebagai penanggung jawab teknis integrasi kurikulum ke dalam satuan pendidikan.

- 2) Mitra Pendukung:

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar;
- Majelis Adat atau akademisi budaya lokal;
- KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Organisasi kepemudaan (misalnya KNPI, Karang Taruna);
- Lembaga pendidikan, universitas, dan NGO bidang pendidikan demokrasi.

2. Produk Hukum yang Ditargetkan

1) Produk Realistis:

Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat tentang *Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Politik Berbasis Nilai Lokal*. Kepgub lebih realistis, cepat diproses, dan dapat mengikat secara administratif lintas Perangkat Daerah untuk implementasi tahap awal/pilot. (Turunan Permendagri 36 Tahun 2010)

3. Strategi untuk Mencapai Produk Hukum

1) *Advokasi dan Komunikasi Kebijakan*

- Menginisiasi dialog awal antara Bakesbangpol, Disdik Jabar, dan Biro Hukum untuk membahas urgensi dan ruang legal formal kebijakan.
- Mengembangkan naskah akademik ringkas sebagai dasar penyusunan *Kepgub* (bisa dikerjakan bersama mitra akademisi dan praktisi pendidikan politik).

2) *Kolaborasi dan Konsultasi Publik*

- Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder utama (Disdik, Bappeda, Majelis Budaya, KPU, Bawaslu, organisasi kepemudaan).

Hasil FGD digunakan untuk menyusun draft kurikulum dan materi pembelajaran berbasis konteks lokal dan demokrasi.

4. Tahapan Implementasi Kurikulum

Tahapan	Kegiatan Utama	Output
1. Persiapan Awal	Identifikasi stakeholder, perumusan tim kerja lintas OPD	Tim pengarah dan pelaksana
2. Penyusunan Kurikulum	FGD, penyusunan materi, validasi akademik	Draft Kurikulum dan RPP
3. Pengesahan Produk	Penyusunan naskah Kepgub dan pengajuan ke Gubernur	Kepgub Kurikulum Politik

4. Komunikasi Kebijakan	Sosialisasi produk Kebijakan	Media komunikasi
5. Pelaksanaan Pilot Project	Uji coba di beberapa sekolah	Laporan evaluasi pelaksanaan
6. Monitoring dan Evaluasi	Survei dampak, pre-post test, forum evaluasi	Rekomendasi penyempurnaan dan perluasan

REFERENSI

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Tahun 2010 / Nomor 310);
- Susanto. (1992). Pengantar Sosialisasi. Rajawali Press;
- Gutmann, A. (1999). Democratic Education. Princeton University Press;
- Syarbaini, S., & dkk. (2014). Sosiologi dan Politik. Ghalia Indonesia;
- WIRA Edisi Khusus 2017, Kementerian Pertahanan RI;
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Analisis Kebijakan Publik, 2021.